



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

2016 - 2021

REVIU RENSTRA

**KECAMATAN
BALONGBENDO**

oktober 2020

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan taufiq serta hidayahNya penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongbendo Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Kecamatan Balongbendo ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja tahunan di Kecamatan Balongbendo.

Selanjutnya kami sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Renstra Kecamatan Balongbendo ini. Kami menyadari bahwa penyusunan Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo Kabupaten ini belum sempurna, oleh karenanya kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penyusunan Renstra ini di tahun mendatang.



ACHMAD FARKAN JAZULI. S.STP.MM

Pembina

NIP. 19790114 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
2.2. Sumber Daya Kecamatan Balongbendo	20
2.3. Kinerja Pelayanan Kec. Balongbendo Kabupaten Sidaorjo	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidaorjo	33
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo	35
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	37
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kec. Balongbendo	44
4.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Balongbendo	45
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1. Rencana Program	55
BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BALONGBENDO MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
6.1. Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD	93

6.2.	Indikator Kinerja Kecamatan Balongbendo, Kabupaten, Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	93
BAB VII	PENUTUP.....	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Jumlah Pegawai Kecamatan Balongbendo.....	20
Tabel 2.2 Data Jumlah Pegawai Kecamatan Balongbendo Berdasarkan Eselonering.....	20
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Balongbendo Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Balongbendo Berdasarkan Pangkat/Gol ...	21
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Kecamatan Balongbendo Berdasarkan Usia.....	22
Tabel 2.6 Sarana Prasarana Milik Kecamatan Balongbendo.....	22
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Sesuai Indikator Kinerja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Periode 2011-2015.....	30
Tabel 2.8 Standar Penilaian Kinerja.....	32
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.....	35
Tabel 3.2 Telaah RTRW Kecamatan Balongbendo	38
Tabel 4.1 Matriks Visi RPJMD, Misi RPJMD, Tujuan RPJMD, Sasaran RPJMD, Indikator Tujuan RPJMD, Tujuan PD, Sasaran PD, Indikator Sasaran PD, Dan Indikator Sasaran OPD.....	52
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran dan Target Sasaran OPD.....	53
Tabel 4.3 Linearitas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Strategi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.....	54
Tabel 5.1 Target Rencana dan Anggaran Program Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.....	59
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Balongbendo 2016-2021 Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Balongbendo.....	19
Gambar 2.2 Pohon Kinerja Sasaran 1	47
Gambar 2.3 Pohon Kinerja Sasaran 2	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi; (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. SKPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2016-2021.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat. Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pelayanan Kabupaten Sidoarjo ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan

Balongbendo, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan stakeholder lainnya yang ada di Sidoarjo.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2016 – 2021, sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam pelayanan publik Kabupaten termasuk juga Rencana Kerja SKPD. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara priodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Balongbendo Tahun 2016-2021 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 10) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 11) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
 - 22) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 23) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 - 2029;
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025;
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- 34) Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- 35) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balongbendo Tahun 2016-2021 merupakan dokumen resmi perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan tujuan, sasaran, program kegiatan serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Balongbendo Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud:

- 1) Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahun Kecamatan Balongbendo;
- 2) Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Balongbendo dalam jangka menengah;

- 3) Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Balongbendo yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

- 1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Balongbendo.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.4 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Balongbendo
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Balongbendo

4.3 Pohon Kinerja

BAB V SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Disamping menyelenggarakan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan dan/ atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat juga melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Perhubungan;
- e. Tenaga Kerja;
- f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Perindustrian;
- i. Perdagangan;
- j. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- k. Lingkungan Hidup;
- l. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- m. Sosial.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BALONGBENDO

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kecamatan Balongbendo terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri dari Sekretaris Kecamatan dan 2 Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi – Seksi terdiri dari
 1. Seksi Pemerintahan
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 3. Seksi Perekonomian
 4. Seksi Kesejahteraan Sosial
 5. Seksi Pembangunan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1 .Camat

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;

- I. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

2.1.2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

2.1.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- c. menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

2.1.2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas meliputi:

- a. menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- b. mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. menyiapkan rencana kebutuhan anggaran;
- d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

2.1.3 Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi :
 1. pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Pemusyawaratan Desa;
 2. evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa;
 3. pengambilan sumpah dan janji anggota badan pemusyawaratan desa;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

2.1.2. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain :
 1. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

2. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 3. pengawasan dan penertiban usaha (bangunan/reklame liar);
 4. penanganan konflik sosial.
- c. memproses permohonan Izin Gangguan usaha mikro;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

2.1.3. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perekonomian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi :
 1. pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
 2. pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- c. pemrosesan permohonan perizinan, meliputi :
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

2.1.4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;

- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, meliputi :
 - 1. pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan;
 - 2. pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

2.1.5. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

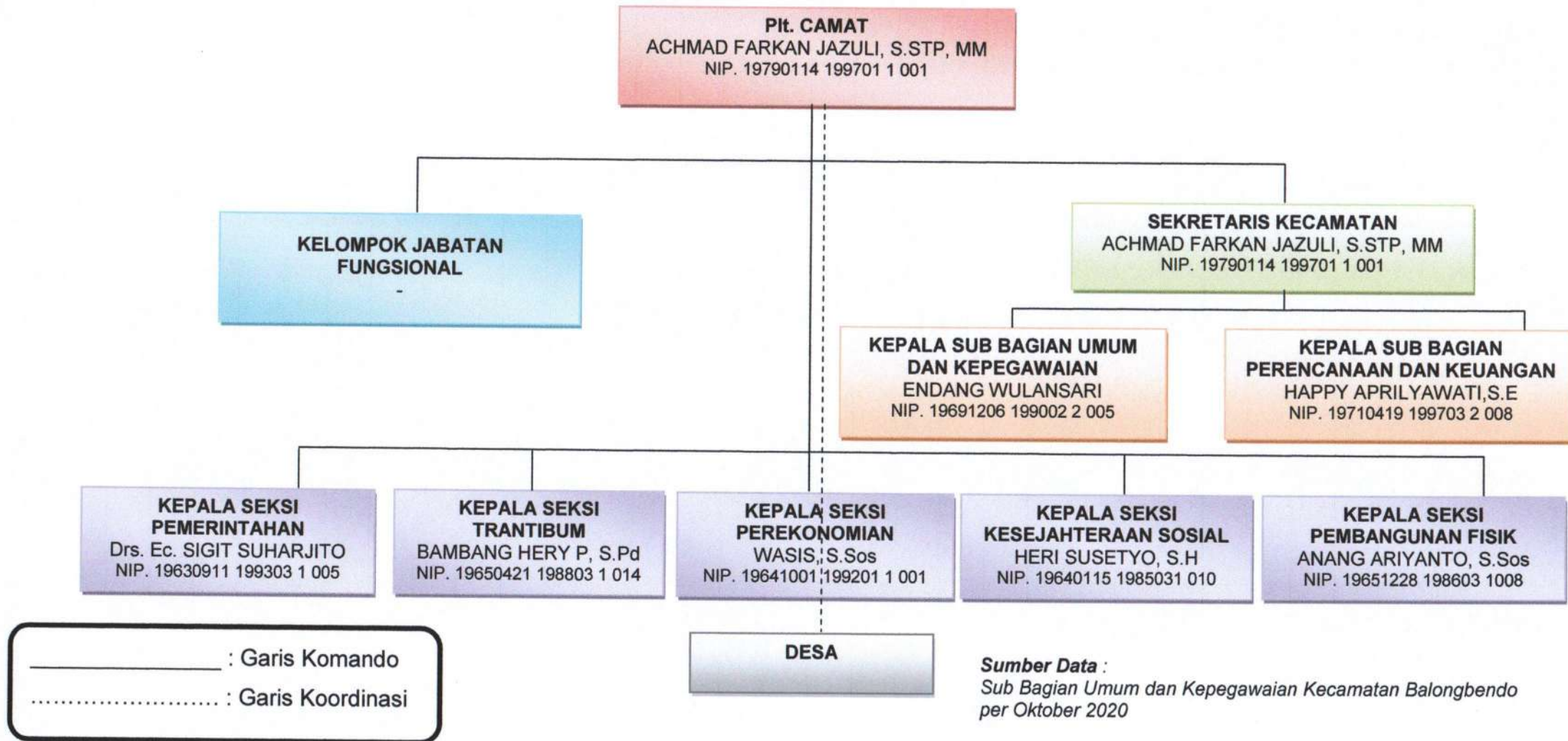
- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan, meliputi :
 - 1. pembinaan penanganan sampah domestik;
 - 2. pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi :
 - 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) usaha mikro;
 - 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luasan bangunan 400 m² (empat ratus meter persegi).
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan serta lingkungan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo di bidang Kewilayahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dalam Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Balongbendo



2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN BALONGBENDO

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Balongbendo didukung oleh Sumber Daya yang ada, adapun sumberdaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur di lingkungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam melaksanakan misi yang ingin dicapai.

Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada. Kondisi aparatur Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo bila ditinjau dari segi jumlah, tingkat pendidikan formal serta pendidikan perjenjangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Jumlah Pegawai Kecamatan Balongbendo

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	27
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	14
Jumlah		41

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Balongbendo Per Oktober 2020

Tabel 2.2
Data Jumlah Pegawai Kecamatan Balongbendo Berdasarkan Eselonering

No	Proporsi Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Eselon III a	0
2	Eselon III b	1
3	Eselon IV a	5
4	Eselon IV b	2
5	Non Eselon	19
Jumlah		27

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Balongbendo Per Oktober 2020

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Balongbendo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan S2	1
2	Pendidikan S1	7
3	Pendidikan D3	3
4	Pendidikan SMA/SMK	16
5	Pendidikan SMP	0
6	Pendidikan SD	0
JUMLAH		27

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Balongbendo Per Oktober 2020

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Balongbendo
Berdasarkan Pangkat / Gol

No	Pangkat/ Gol	Jumlah
1	Pembina Utama / IV e	0
2	Pembina Utama Madya / IV d	0
3	Pembina Utama Muda / IV c	0
4	Pembina Tk. I / IV b	0
5	Pembina / IV a	1
6	Penata Tk. I / III d	7
7	Penata / III c	1
8	Penata Muda Tk. I / III b	0
9	Penata Muda / III a	0
10	Pengatur Tk. I / II d	7
11	Pengatur / II c	10
12	Pengatur Muda Tk. I / II b	0
13	Pengatur Muda / II a	1
14	Juru Tk. I / I d	0
15	Juru / I c	0
16	Juru Muda Tk. I / I b	0
17	Juru Muda / I a	0
JUMLAH		27

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Balongbendo Per Oktober 2020

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Kecamatan Balongbendo
Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	21 – 30 Tahun	2
2	31 – 40 Tahun	4
3	41- 50 Tahun	10
4	51 – 58 Tahun	11
JUMLAH		27

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Balongbendo Per Oktober 2020

Dengan jumlah pegawai pada usia produktif (usia di bawah 50 tahun) yang mencapai lebih dari 50 % dengan tingkat pendidikan di atas diharapkan Kecamatan Balongbendo dapat melaksanakan dengan baik tugas pokok dan fungsi sebagai organisasi perangkat daerah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balongbendo telah tersedia sarana dan prasarana meliputi:

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Milik Kecamatan Balongbendo

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Tanah	1979	1	616.000.000	616.000.000
2	Station Wagon	1997	1	60.000.000	60.000.000
3	Station Wagon	2007	1	129.500.000	129.500.000
4	Station Wagon	2014	1	230.430.000	230.430.000
5	Pick Up	2014	1	188.627.222	188.627.222
6	Sepeda Motor	2004	1	9.140.000	9.140.000
7	Sepeda Motor	2013	3	15.083.000	45.249.000
8	Sepeda Motor	2014	2	13.972.384	27.944.768
9	Sepeda Motor	2014	3	13.880.000	41.640.000
10	Sepeda Motor	2014	1	21.453.850	21.453.850
11	Timbangan	2014	1	900.000	900.000
12	Mesin Ketik	2013	1	2.500.000	2.500.000
13	Mesin Absen	2009	1	16.417.500	16.417.500

14	Mesin Absen	2015	1	7.500.000	7.500.000
15	Mesin Absen	2016	1	4.480.000	4.480.000
16	Mesin Fotocopy Folio	2013	1	9.500.000	9.500.000
17	Lemari Besi/metal	2003	1	2.450.000	2.450.000
18	Lemari Besi/metal	2018	1	72.665.000	72.665.000
19	Lemari Besi/metal	2018	1	61.665.000	61.665.000
20	Lemari Besi/metal	2018	1	50.665.000	50.665.000
21	Lemari Kayu	1983	1	150.000	150.000
22	Lemari Kayu	2012	1	7.500.000	7.500.000
23	Lemari Kayu	2018	4	2.700.000	10.800.000
24	Rak Besi	2016	4	2.000.000	8.000.000
25	Rak Besi	2015	2	2.000.000	4.000.000
26	Rak Kayu	2012	1	500.000	500.000
27	Rak Kayu	2013	2	2.500.000	5.000.000
28	Rak Kayu	2018	1	4.950.000	4.950.000
29	Filing Cabinet Besi	2011	2	2.000.000	4.000.000
30	Filing Cabinet Besi	2014	3	2.000.000	6.000.000
31	Filing Cabinet Besi	2016	4	2.250.000	9.000.000
32	Lemari Katalog	2013	1	5.000.000	5.000.000
33	Lemari Kaca	2010	1	2.500.000	2.500.000
34	Lemari Kaca	2012	3	2.500.000	7.500.000
35	Lemari Kaca	2009	1	2.000.000	2.000.000
36	Lemari Kaca	2014	4	2.500.000	10.000.000
37	Lemari Kaca	2015	4	2.450.000	9.800.000
38	Lemari Kaca	2015	1	9.410.000	9.410.000
39	Lemari Kaca	2016	3	2.950.000	8.850.000
40	Lemari Kaca	2016	2	3.150.000	6.300.000
41	Lemari Kaca	2010	1	3.600.000	3.600.000
42	Lemari Kaca	2011	4	2.500.000	10.000.000
43	Lemari Kaca	2019	1	22.612.389	22.612.389
44	Lainnya	1986	1	25.000	25.000
45	Running Text	2016	1	14.960.000	14.960.000
46	Alat Penghancur Kertas	2011	1	2.000.000	2.000.000
47	Alat Penghancur Kertas	2016	1	3.420.000	3.420.000
48	Mesin Absensi	2016	1	28.900.000	28.900.000
49	Lcd Projector/infocus	2019	1	9.959.000	9.959.000
50	Kotak Surat	2016	1	2.000.000	2.000.000

51	Kotak Surat	2016	1	2.000.000	2.000.000
52	Mesin Antrian	2013	1	6.000.000	6.000.000
53	Mesin Antrian	2016	1	45.685.000	45.685.000
54	Papan Nama Instansi	2014	1	7.500.000	7.500.000
55	Papan Pengumuman	2015	1	1.500.000	1.500.000
56	UPS	2011	1	690.000	690.000
57	Rak Koran	2016	1	2.000.000	2.000.000
58	Rak TV	2012	1	500.000	500.000
59	UPS	2016	1	7.480.000	7.480.000
60	UPS	2012	4	800.000	3.200.000
61	Peralatan jaringan	2011	1	957.000	957.000
62	Meja Kerja Kayu	1996	1	500.000	500.000
63	Meja Kerja Kayu	2013	7	1.114.285	7.799.995
64	Kursi Besi/metal	2019	1	4.500.000	4.500.000
65	Meja Rapat	2014	1	11.475.000	11.475.000
66	Tempat Tidur Besi	2014	1	4.000.000	4.000.000
67	Meja Podium	2010	1	4.600.000	4.600.000
68	Meja Podium	2016	1	4.999.500	4.999.500
69	Meja Resepsionis	2019	1	40.150.000	40.150.000
70	Meja Panjang	1987	10	250.000	2.500.000
71	Meja Panjang	2011	1	14.975.000	14.975.000
72	Kursi Rapat	2014	50	350.000	17.500.000
73	Kursi Rapat	2014	15	600.000	9.000.000
74	Kursi Tamu	2012	4	3.000.000	12.000.000
75	Kursi Tamu	2013	2	2.500.000	5.000.000
76	Kursi Tamu	2014	1	2.450.000	2.450.000
77	Kursi Tamu	2014	1	2.400.000	2.400.000
78	Kursi Tamu	2007	1	2.250.000	2.250.000
79	Meja Komputer	1995	1	250.000	250.000
80	Meja Komputer	2003	2	850.000	1.700.000
81	Sofa	2014	1	3.500.000	3.500.000
82	Sofa	2009	1	2.000.000	2.000.000
83	Sofa	2013	2	5.000.000	10.000.000
84	Jam Elektronik	2012	1	4.000.000	4.000.000
85	Mesin Pemotong Rumput	2013	1	2.000.000	2.000.000
86	Mesin Pemotong Rumput	2019	1	2.200.000	2.200.000
87	Pompa Air	2012	1	750.000	750.000

88	Lemari Es	2012	1	2.750.000	2.750.000
89	Lemari Es	2015	1	3.440.000	3.440.000
90	Lemari Es	2015	1	2.200.000	2.200.000
91	Lemari Es	2015	1	2.200.000	2.200.000
92	AC	2018	1	20.900.000	20.900.000
93	AC	2007	1	4.500.000	4.500.000
94	AC	2010	2	3.500.000	7.000.000
95	AC	2011	2	3.500.000	7.000.000
96	AC	2012	2	3.500.000	7.000.000
97	AC	2013	2	3.500.000	7.000.000
98	AC	2014	2	6.500.000	13.000.000
99	AC	2014	2	3.500.000	7.000.000
100	AC	2015	2	3.725.000	7.450.000
101	AC	2015	2	7.770.000	15.540.000
102	AC	2018	1	3.950.000	3.950.000
103	AC	2019	1	6.850.000	6.850.000
104	AC	2013	1	13.410.000	13.410.000
105	AC	2012	1	3.500.000	3.500.000
106	AC	2012	1	3.500.000	3.500.000
107	Korden	2015	1	5.200.000	5.200.000
108	Televisi	2009	1	1.000.000	1.000.000
109	Televisi	2010	1	2.572.000	2.572.000
110	Televisi	2012	2	2.459.000	4.918.000
111	Televisi	2014	1	2.489.000	2.489.000
112	Televisi	2014	1	3.500.000	3.500.000
113	Televisi	2015	1	3.435.000	3.435.000
114	Televisi	2016	2	3.500.000	7.000.000
115	Televisi	2016	1	12.131.200	12.131.200
116	Video Cassette	2013	1	750.000	750.000
117	Unit Power Supply	2014	5	750.000	3.750.000
118	Unit Power Supply	2019	7	735.000	5.145.000
119	Alat Hiasan	2004	1	50.000	50.000
120	Lambang Garuda Pancasila	2004	3	125.000	375.000
121	Gambar Presiden/Wapres	2004	1	50.000	50.000
122	Tangga Aluminium	2012	1	1.500.000	1.500.000
123	Kaca Hias	2014	2	325.000	650.000
124	Dispenser	2013	1	2.500.000	2.500.000

125	Lambang Instansi	2004	1	50.000	50.000
126	Handy Cam	2016	1	4.000.000	4.000.000
127	Vertikal Blind	2018	1	9.760.000	9.760.000
128	Lemari Plastik	2016	1	7.499.800	7.499.800
129	Tripod KTP-el	2018	1	950.000	950.000
130	Alat Potong Kertas	2019	1	1.250.000	1.250.000
131	Mesin Potong Kayu	2019	1	3.200.000	3.200.000
132	Lemari Slang	2015	1	518.000	518.000
133	Meja Kerja	2010	1	4.500.000	4.500.000
134	Meja Kerja	2012	1	3.500.000	3.500.000
135	Meja Kerja	2012	4	2.000.000	8.000.000
136	Meja Kerja	2018	1	2.420.000	2.420.000
137	Meja Kerja	2019	1	2.500.000	2.500.000
138	Meja Kerja	2014	1	1.450.000	1.450.000
139	Meja Kerja	2014	1	1.450.000	1.450.000
140	Meja Tamu Biasa	2016	1	54.730.000	54.730.000
141	Kursi Kerja	2012	1	2.000.000	2.000.000
142	Kursi Kerja	2012	4	1.500.000	6.000.000
143	Kursi Kerja	2013	11	954.546	10.500.006
144	Kursi Kerja	2013	36	235.000	8.460.000
145	Kursi Kerja	2014	10	600.000	6.000.000
146	Kursi Kerja Non Struktural	2015	1	4.935.000	4.935.000
147	Kursi Kerja Non Struktural	2019	1	1.200.000	1.200.000
148	Kotak Saran	2016	1	2.000.000	2.000.000
149	Audio Video Selector (peralatan Studio Audio)	2015	1	4.925.000	4.925.000
150	Audio Visual	2012	1	7.500.000	7.500.000
151	Microphone/boom Stand	2011	4	1.000.000	4.000.000
152	Professional Sound System	2016	1	9.955.000	9.955.000
153	Digital Audio Storage System	2014	1	4.375.000	4.375.000
154	Microphone Cable	2016	4	500.000	2.000.000
155	Camera Electronic	2016	1	7.700.000	7.700.000
156	Camera Electronic	2016	1	7.960.000	7.960.000
157	Slide Projector	2014	1	11.000.000	11.000.000
158	Camera Digital	2010	1	4.800.000	4.800.000
159	Camera Digital	2018	1	11.623.480	11.623.480
160	Lcd Monitor	2010	1	13.175.000	13.175.000
161	Pesawat Telephone	2003	1	30.000	30.000

162	Facsimile	2008	1	1.750.000	1.750.000
163	Facsimile	2008	1	2.290.000	2.290.000
164	Wireless Amplifier	2016	1	50.690.000	50.690.000
165	Layar Proyektor	2016	2	1.900.000	3.800.000
166	P.c Unit	2009	1	10.245.000	10.245.000
167	P.c Unit	2009	1	5.145.000	5.145.000
168	P.c Unit	2009	1	4.480.000	4.480.000
169	P.c Unit	2012	3	7.088.000	21.264.000
170	P.c Unit	2013	1	7.600.000	7.600.000
171	P.c Unit	2014	2	7.000.000	14.000.000
172	P.c Unit	2015	2	7.420.000	14.840.000
173	P.c Unit	2015	1	8.250.000	8.250.000
174	P.c Unit	2016	3	9.950.000	29.850.000
175	P.c Unit	2016	1	20.000.000	20.000.000
176	P.c Unit	2018	4	8.151.500	32.606.000
177	P.c Unit	2018	1	22.850.000	22.850.000
178	P.c Unit	2019	2	9.375.000	18.750.000
179	Lap Top	2007	1	14.850.000	14.850.000
180	Lap Top	2010	1	13.825.000	13.825.000
181	Lap Top	2011	1	14.225.000	14.225.000
182	Lap Top	2011	2	4.500.000	9.000.000
183	Lap Top	2014	1	12.216.000	12.216.000
184	Lap Top	2015	1	12.820.000	12.820.000
185	Lap Top	2015	1	6.380.000	6.380.000
186	Lap Top	2016	1	11.750.000	11.750.000
187	Note Book	2013	1	8.500.000	8.500.000
188	Note Book	2012	1	9.042.250	9.042.250
189	Note Book	2018	1	7.953.000	7.953.000
190	Note Book	2018	1	19.862.383	19.862.383
191	Net Book	2011	1	11.283.650	11.283.650
192	Net Book	2012	3	9.042.250	27.126.750
193	Net Book	2014	3	8.500.000	25.500.000
194	Card Reader KTP-el	2018	1	7.192.068	7.192.068
195	Line Printer	2012	1	68.950.000	68.950.000
196	Hard Disk	2016	1	1.025.000	1.025.000
197	Card Reader KTP-el	2016	1	5.240.000	5.240.000
198	Scanner	2016	1	4.950.000	4.950.000

199	Printer	2010	1	950.000	950.000
200	Printer	2011	1	4.389.000	4.389.000
201	Printer	2012	1	1.100.000	1.100.000
202	Printer	2013	2	6.750.000	13.500.000
203	Printer	2014	3	700.000	2.100.000
204	Printer	2014	2	950.000	1.900.000
205	Printer	2015	2	1.200.000	2.400.000
206	Printer	2015	2	800.000	1.600.000
207	Printer	2015	1	2.950.000	2.950.000
208	Printer	2015	1	618.750	618.750
209	Printer	2016	1	55.750.000	55.750.000
210	Printer	2018	1	49.050.000	49.050.000
211	Printer	2019	4	1.960.800	7.843.200
212	Printer	2019	4	1.375.000	5.500.000
213	Printer	2019	5	2.926.875	14.634.375
214	Scanner	2016	1	4.975.000	4.975.000
215	Finger Print Scanner	2016	1	19.800.000	19.800.000
216	Signature Pad KTP-el	2016	1	12.460.000	12.460.000
217	Finger Print Scanner	2018	1	30.912.000	30.912.000
218	Irish Scanner	2018	1	21.116.983	21.116.983
219	Signature Pad KTP-el	2018	1	14.137.710	14.137.710
220	Scanner	2019	1	5.463.500	5.463.500
221	Koper KTP-el	2018	1	9.900.440	9.900.440
222	Server	2016	1	35.600.000	35.600.000
223	Server	2017	1	149.561.900	149.561.900
224	Server	2016	1	50.600.000	50.600.000
225	Bangunan Kantor	1975	1	4.771.752.705	4.771.752.705
226	Papan Nama Instansi	2018	1	70.647.800	70.647.800
227	Saluran Sekunder Pembuang (bangunan Pembuang Irigasi)	2013	1	50.130.000	50.130.000
228	Penangkal Petir	2016	1	31.580.000	31.580.000
229	Jaringan Listrik	2011	1	2.022.600	2.022.600
230	Jaringan Listrik	2011	1	5.500.000	5.500.000

Sumber: Laporan Barang Kecamatan Balongbendo Tahun 2019

Dari data sarana dan prasarana di atas, keadaan sarana dan prasarana pada Kecamatan Balongbendo dalam keadaan baik

sehingga dapat menunjang kegiatan pelayanan masyarakat pada Kecamatan Balongbendo.

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO

Pengukuran capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balongbendo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja dan anggaran dana.

a. Capaian kinerja pada masing indikator kinerja

Tabel 2.7

Capaian Kinerja Sesuai Indikator Kinerja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Periode 2011-2015

SASARAN STRATEGIS		TAHUN DASAR	2011		2012		2013		2014		2015	
URAIAN	IKU	2010	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)											
Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti.											
	Persentase hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti.	100%		100%			100%	100%	100%		100%	
	Persentase hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%		100%			100%	100%	100%		100%	
	Persentase hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti											
	Persentase hasil koordinasi bidang pembangunan fisik yang ditindaklanjuti											

SASARAN STRATEGIS		TAHUN DASAR	2011		2012		2013		2014		2015	
URAIAN	IKU	2010	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan	Persentase desa yang sudah menyusun APBDesa sesuai dengan juknis											
	Persentase desa yang sudah menyusun LPPD sesuai dengan juknis	100%		100%			100%	100%	100%		100%	
	Persentase desa yang sudah melaksanakan musrenbang desa sesuai dengan juknis	100%		100%			100%	100%	100%		100%	

Penjelasan dari hasil kinerja tersebut adalah:

1. Koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan dengan indikator persentase hasil koordinasi bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban umum dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti mencapai 100%.
2. Penyelenggaraan pemerintah desa dengan indikator persentase desa yang sudah menyusun APBDes dan LPPD sesuai juknis mencapai 100%. dan untuk indikator persentase desa yang sudah melaksanakan musrenbang desa sesuai dengan juknis mencapai 100%.

b. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dalam hal ini dana yang digunakan membiayai kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat. Kecamatan Balongbendo sangat berkepentingan menyampaikan laporan kinerja sebagai gambaran dari Kecamatan Balongbendo dalam upaya meningkatkan performansi organisasinya. Guna menilai capaian kinerja sasaran dan indikatornya maka ditetapkan standar penilaian kinerja untuk menganalisis hasil kinerja Kecamatan Balongbendo.

Tabel 2.8
Standar Penilaian Kinerja

No	Nilai (%)	Kategori
1	91-100	Sangat Berhasil
2	81-90	Berhasil
3	60-80	Cukup
4	<60	Kurang Berhasil

Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Kecamatan Balongbendo pada Tahun Anggaran 2019 adalah **Rp. 2.254.872.380,00** sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 2.041.338.538,00** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 213.533.842,00** Jadi jika dinilai berdasarkan standart diatas maka kinerja Kecamatan Balongbendo dalam katagori "Berhasil" karena mencapai nilai **90,53 %**.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN BALONGBENDO

Dalam menghadapi tantangan dan peluang tersebut, diperlukan strategi yang tepat agar dapat memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan yang ada. Salah satu cara untuk membuat strategi yang tepat adalah dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*). Berikut adalah identifikasi SWOT Kecamatan Balongbendo Kab.Sidoarjo.

1. Kekuatan (*Strengths*)
 - a. Tersedianya Peraturan Pemerintah
 - Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
 - Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Tersedianya SOP dan SP dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Koordinasi pada masing-masing bidang (Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian, Bidang Keamanan dan Ketertiban umum, Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Pembangunan Fisik) sudah bagus.
 - d. Sarana dan Prasarana sudah memadai.
2. Kelemahan (*Weakness*)
 - a. Penguasaan teknologi informasi masih minim.
 - b. Kualitas aparatur pemerintah desa yang belum memadai.
 - c. Sumber Daya Manusia berlatar belakang IT dan pengetahuan peraturan perundang-undangan yang masih minim.
3. Peluang (*Opportunity*)
 - a. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - b. Dukungan anggaran dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang lebih besar.
 - c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin baik (banyaknya aplikasi yang dibuat oleh SKPD dalam peningkatan pelayanan).
4. Ancaman (*Threat*)
 - a. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dari berbagai kepentingan.

- b. Tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat.
- c. Tingkat kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan masih kurang.

Hasil identifikasi di atas akan dianalisis agar bisa mengetahui strategi yang tepat. Penyusunan strategi seperti di bawah ini:

1. S-O (*Strength-Opportunity*) Strateginya adalah:
 - a) Meningkatkan koordinasi di masing-masing bidang dan menindaklanjuti hasil koordinasi.
 - b) Menerapkan aplikasi untuk mendukung pelayanan yang lebih baik.
 - c) Meningkatkan jumlah target penyelenggaraan pemerintah desa (penyusunan APBDes dan LPPD) yang sesuai juknis dengan cara mensupervisi hasil penyusunannya.
2. S-T (*Strength-Threat*)
 - a) Menerapkan aplikasi yang ada dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan akan semakin cepat.
 - b) Menerapkan peraturan/SOP terhadap setiap kegiatan/pelayanan yang dilakukan agar ketika terjadi pertentangan dapat berpedoman pada peraturan/SOP yang ada.
3. W-O (*Weakness-Opportunity*)
 - a) Pengadaan tenaga honorer yang berlatar belakang IT.
 - b) Meningkatkan sumber daya manusia melalui diklat formal maupun Diklat non formal
4. W-T (*Weakness-Threat*)
 - a) Sosialisasi tentang Pelayanan Umum
 - b) Koordinasi antar bidang diperbaiki agar bisa jadi lebih baik.

**BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SKPD**

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN
SIDOARJO**

Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo pada umumnya merupakan instansi atau Organisasi Perangkat Daerah yang juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan-permasalahan. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo**

No	Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini (2016)	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84.50 %	Sarana dan prasarana pelayanan Kualitas Sumber Daya Aparatur SOP dan SPP pelayanan Ketepatan, kejelasan dan kecepatan waktu pelayanan Penerapan Teknologi dan informasi	Pemahaman Masyarakat mengenai SOP dan SPP Pelayanan Dukungan dan tindak lanjut dari OPD Terkait dalam penerusan pelayanan kependudukan	Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran baik ditingkat kecamatan maupun desa Kurangnya perlengkapan penunjang teknis yang berbasis teknologi dalam melakukan pelayanan ataupun sosialisasi Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian,	100%	Ketersedia Sumber Daya Aparatur yang Memadai Intensitas koordinasi dan komunikasi antar actor terkait	peran serta dan keaktifan dari actor terkait	Masih ada aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah

No	Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini (2016)	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
1	2	3	4	5	6
	Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik				Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3	Persentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	100 %	Pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pelaporan secara intensif dan rutin	Peran Aktif desa dalam pelatihan dan pendampingan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Desa Program dan Kegiatan kepada Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo
			Kualitas Sumberdaya Kecamatan dalam perencanaan dan pelaporan yang berkualitas	Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di kecamatan Balongbendo	Perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/ belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar instansi dalam urusan perencanaan.
					Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan

3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo untuk periode RPJMD 2016-2021 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Jika merujuk pada visi tersebut, maka dapat diamati bahwa, Kecamatan mempunyai andil dalam menunjang visi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Adapun Misi dari Visi tersebut:

1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif, dan transparan.
2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban
5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang kebutuhan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Merujuk pada Misi tersebut, poin misi yang mampu terjawab oleh pemerintahan kecamatan adalah **Misi Satu** yaitu ***Pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan*** dan **Misi Dua** yaitu ***Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.***

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Balongbendo. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang existing maka kecamatan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Kecamatan Balongbendo dalam lima tahun.

Penataan ruang dilaksanakan guna terciptanya pemanfaatan lahan yang optimal dalam bermasyarakat. Oleh karena itu permasalahan dan pelaksanaan tata ruang wilayah haruslah diimplementasikan secara detail dan cermat sehingga setiap komponen wilayah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan: a)

Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. b) Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. c) Perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tabel 3.3.
Telaah RTRW Kecamatan Balongbendo

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD
1	2	3	4	5
1	Secara perwilayahan Kecamatan Balongbendo termasuk ke dalam SSWP IV yaitu dengan pusat di Kawasan Krian dan fungsi utama pertanian teknis, zona industri ditunjang dengan kegiatan permukiman kepadatan rendah.	kawasan permukiman seluas 290,01 Ha	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1. fasilitasi dan koordinasi dalam pengembangan wilayah kecamatan
2	Kecamatan Balongbendo termasuk pada kawasan Rencana pengembangan jalan kolektor primer serta pengembangan wilayah prioritas yang menadapatkan pelayanan air bersih dan sekaligus sebagai jaringan distribusi air bersih serta sebagai ruang untuk utilitas (air bersih).	kawasan permukiman perkotaan seluas 1,511,72 Ha		2. perijinan pembangunan rumah dan fasilitas penunjang (Listrik/Air bersih) pada kawasan permukiman
3	Kecamatan Balongbendo termasuk juga kawasan agropolitan tanaman pangan dan hortikultura, Relokasi jalur kereta api Sidoarjo-Gununggangsir.	Balongbendo memiliki zona wilayah persawahan seluas seluas 1.189,70 dan seluas 438,08 Ha		3. Supporting dalam pengawasan pemanfaatan lahan dan alih fungsi lahan

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka Kecamatan Balongbendo perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM di Kecamatan Balongbendo tentang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan

rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga kedepan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

Berdasarkan telaah tersebut terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian RTRW Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

1. Faktor Penghambat:
 - a. Kurangnya analisa dan pengawasan Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan pembangunan berkelanjutan
 - b. Pengembangan potensi lokal yang masih belum optimal
 - c. Kesadaran masyarakat maupun pihak terkait dalam menjaga lingkungan maupun menjaga pencemaran lingkungan yang masih kurang
2. Faktor Pendorong
 - a. Peningkatan pengawasan dan kajian Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan pembangunan berkelanjutan
 - b. Pengoptimalan Kinerja Sumber daya Aparatur
 - c. Koordinasi dan kerjasama antar aktor atau OPD Terkait
 - d. Dukungan Pendanaan Terkait Peningkatan Sarana dan prasarana penunjang

3.4 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional, hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada pelayanan OPD baik dari reviu hasil kinerja maupun keterkaitan antara sasaran RPJMD dan sasaran OPD, serta berdasar pula pada hasil telaah dokumen RTRW terhadap faktor pendukung dan penghambat pelayanan OPD dalam menjalankan tugasnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dijelaskan bahwa tujuan dari SKM adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknik pengukuran SKM yang dilakukan menggunakan kuesioner dan wawancara tatap muka. Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/ Tarif, Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan, Kompetensi

Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Hasil pengolahan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu mengetahui kelemahan atau kekuatan unit penyelenggara pelayanan, Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan unit penyelenggara pelayanan, *Feedback* dalam memperbaiki pelayanan, bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah khususnya Pemerintah Daerah, maka Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Tujuan dari pelaksanaan PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai tidak lanjut dari Permendagri tersebut pula telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 – 270 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Sesuai Pasal 5 Permendagri Nomor 4 tahun 2010, Penerapan PATEN harus memenuhi syarat substantif, teknis dan administratif.

1. Syarat Substantif :
 - a. Pendelegasian sebagian wewenang bupati/ walikota kepada Camat
 - b. Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud meliputi bidang perizinan dan non perizinan.
 - c. Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
2. Syarat Administratif :
 - a. Standar Pelayanan, meliputi :
 - a) Jenis pelayanan
 - b) Persyaratan pelayanan
 - c) Proses/prosedur pelayanan
 - d) Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan
 - e) Waktu pelayanan
 - f) Biaya pelayanan
 - b. Uraian tugas personil kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Walikota
3. Syarat Teknis :

- a. Sarana Prasarana, meliputi :
 - a) Loker/meja pendaftaran
 - b) Tempat pemrosesan berkas
 - c) Tempat pembayaran
 - d) Tempat penyerahan dokumen
 - e) Tempat pengolahan data dan informasi
 - f) Tempat penanganan pengaduan
 - g) Tempat piket
 - h) Ruang tunggu
 - i) Perangkat pendukung lainnya
- b. Pelaksana Teknis, meliputi :
 - a) Petugas informasi
 - b) Petugas loket/penerima berkas
 - c) Petugas operator komputer
 - d) Petugas pemegang kas
 - e) Petugas lain sesuai kebutuhan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sidoarjo, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memperhatikan analisa SWOT, maka isu-isu strategis yang terkait adalah belum optimalnya pola koordinasi lintas sektor di setiap tugas pokok dan fungsi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial, dan Pembangunan yang disebabkan:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan di kecamatan, padahal Perangkat Daerah sebagai unsur kewilayahan adalah ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi masyarakat;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari jumlah maupun kualitas sehingga perlu peningkatan kompetensi dan peningkatan budaya kerja untuk memahami tugas, pokok dan fungsi dalam mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Balongbendo secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) Peraturan Desa

Dalam pembuatan Peraturan Desa permasalahannya masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga setiap pembuatan Peraturan Desa tidak

berkualitas baik dari segi redaksi, tata bahasa, nilai estetika maupun filosofi hukumnya.

2) Pembinaan Perangkat Desa

- a) Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa kemampuannya masih banyak yang kurang.
- b) APBDesa banyak yang terlambat selesainya (tidak tepat waktu)

b. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan.
- 2) Masih banyak dan kurang terkendalinya miras oplosan.
- 3) Minimnya sarana dan prasarana.
- 4) Minimnya kesadaran hukum, hak dan kewajiban.

c. Bidang Perekonomian

- 1) Masih banyak para pelaku Usaha Mikro (UKM) belum mempunyai Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
- 2) Masih banyaknya Proposal Bidang Pemberdayaan yang belum direalisasi.
- 3) Masih banyak pemikiran para Kepala Desa bahwa hasil pengentrian Data IDM dan status Desa menjadi Maju dan Mandiri. Kepala Desa khawatir mendapat bantuan Dana Desa berkurang.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama, dan Kemasyarakatan

- 1) Usulan peserta/penerima PKH warga desa Bakalanwringinpitu dan warga Desa Gagangkepuhsari yang orang tuanya meninggal dunia terkena musibah perahu terbalik di Desa Bogempinggir pada tahun 2017 sampai sekarang belum terealisasi.
- 2) Kepengurusan Karang Taruna yang sudah habis masa jabatannya dan kegiatannya yang kurang aktif.
- 3) Kurangnya kerjasama dan saling menghormati intern antar umat beragama islam.

e. Bidang Pembangunan Fisik:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal dan Usaha Mikro.
- 2) Belum adanya serah terima TPST Kawasan kepada pihak kecamatan dan Desa Kemangsen.
- 3) Kurang pahamnya desa tentang pelaksanaan pembangunan fisik dan administrasinya.
- 4) Masih ada desa yang belum melaksanakan musyawarah dusun dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

- 5) Masih ditemukan usulan yang belum dipilah sesuai dengan kewenangannya.

f. Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) :

- 1) Jumlah blanko KTP-el tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan cetak KTP-el dikarenakan suply blanko dari Dpendukcapil terbatas.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BALONGBENDO

Tujuan disusunnya Renstra ini adalah untuk membangun sebuah Rencana Strategis sebagai pedoman dalam menyusun program dan indikator kinerja lima tahun kedepan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang dilimpahkan kepada Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mewujudkan misi yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan melalui :

Program :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaran pelayanan kecamatan

Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui :

Program :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Program :

- b. Program Koordinasi Ketertiban Umum

Kegiatan :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

Program :

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Urusan sesuai Penugasan Kepala Daerah

Program :

d. Program Pembinaan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN BALONGBENDO

4.2.1 Strategi

Strategi pengembangan pelayanan pada Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:

1. Koordinasi di masing-masing bidang ditingkatkan menjadi lebih baik dan hasil koordinasi ditindaklanjuti. Koordinasi ini terdiri atas beberapa bidang yaitu:
 - a. Bidang Pemerintahan (jumlah perangkat desa yang dilatih dan dibina, jumlah lembaga desa yang dilantik, jumlah desa yang dibina untuk kegiatan lomba – lomba Seksi pemerintahan);
 - b. Bidang Perekonomian (pembinaan wirausaha baru, fasilitasi promosi produk industry, pembinaan penyusunan profil desa/PKL dan UMKMK);
 - c. Bidang keamanan dan ketertiban umum (penanganan bencana, pembinaan anggota Linmas, operasi tibum, penegakan perda dan pembinaan desa untuk lomba – lomba seksi trantibum);
 - d. Bidang kesejahteraan sosial (pembinaan dan fasilitasi rumah tangga miskin, fasilitasi bansos dan baksos, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keragaman budaya dan pawai budaya, pembinaan dan fasilitasi pemuda, olahraga dan ormas);
 - e. Bidang pembangunan fisik (inventarisasi data asset, jumlah pemohon IMB, monitoring musrenbangdes);
 - f. Lingkungan Hidup (penanaman hutan lindung diruang milik jalan desa, pembinaan dan pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau).

2. Menerapkan aplikasi untuk mendukung pelayanan yang lebih baik.
Beberapa aplikasi yang bisa diterapkan adalah:
 - a. Penggunaan sistem database kependudukan.
3. Meningkatkan jumlah target penyelenggaraan pemerintah desa (penyusunan APBDes dan LPPD) yang sesuai juknis dengan cara mensupervisi hasil penyusunannya.

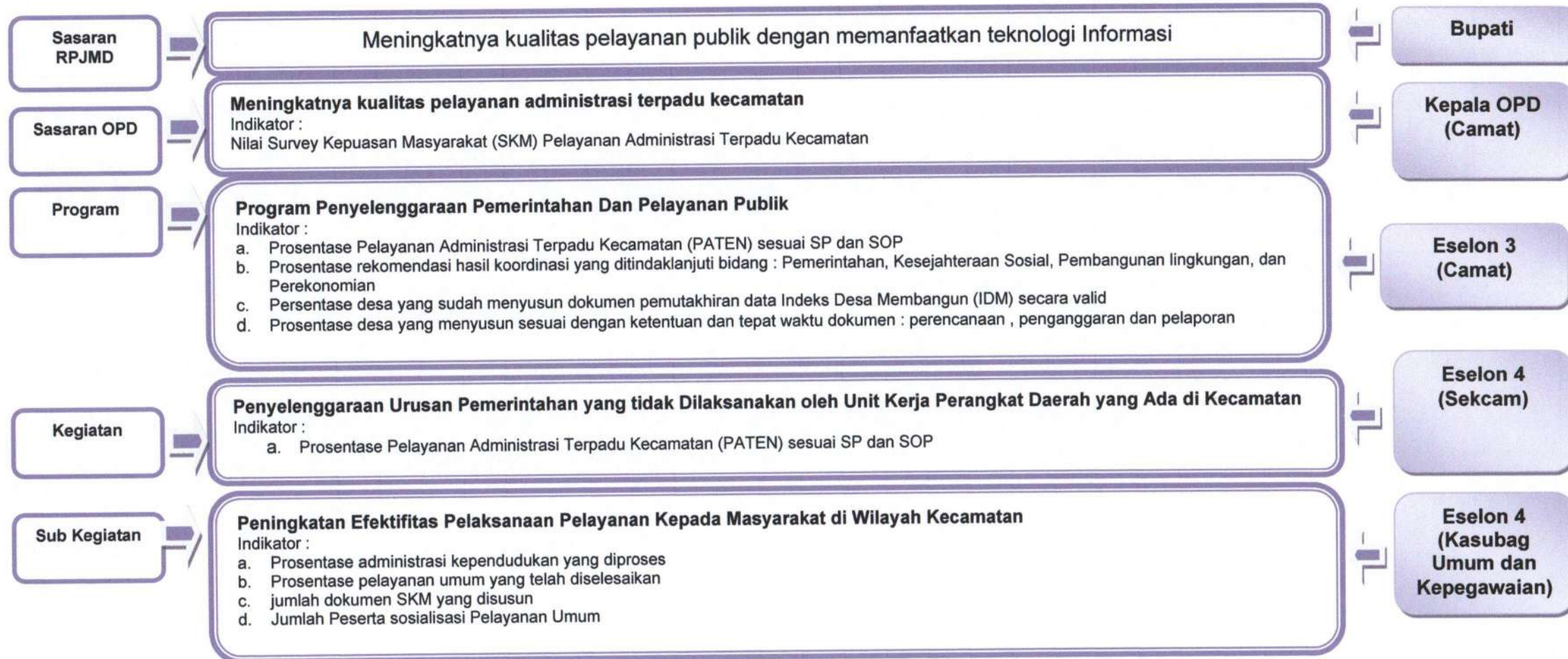
4.2.2 Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. kebijakan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Mengembangkan inovasi pelayanan.
2. Evaluasi standar pelayanan secara berkala.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang.
4. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa dan kecamatan.

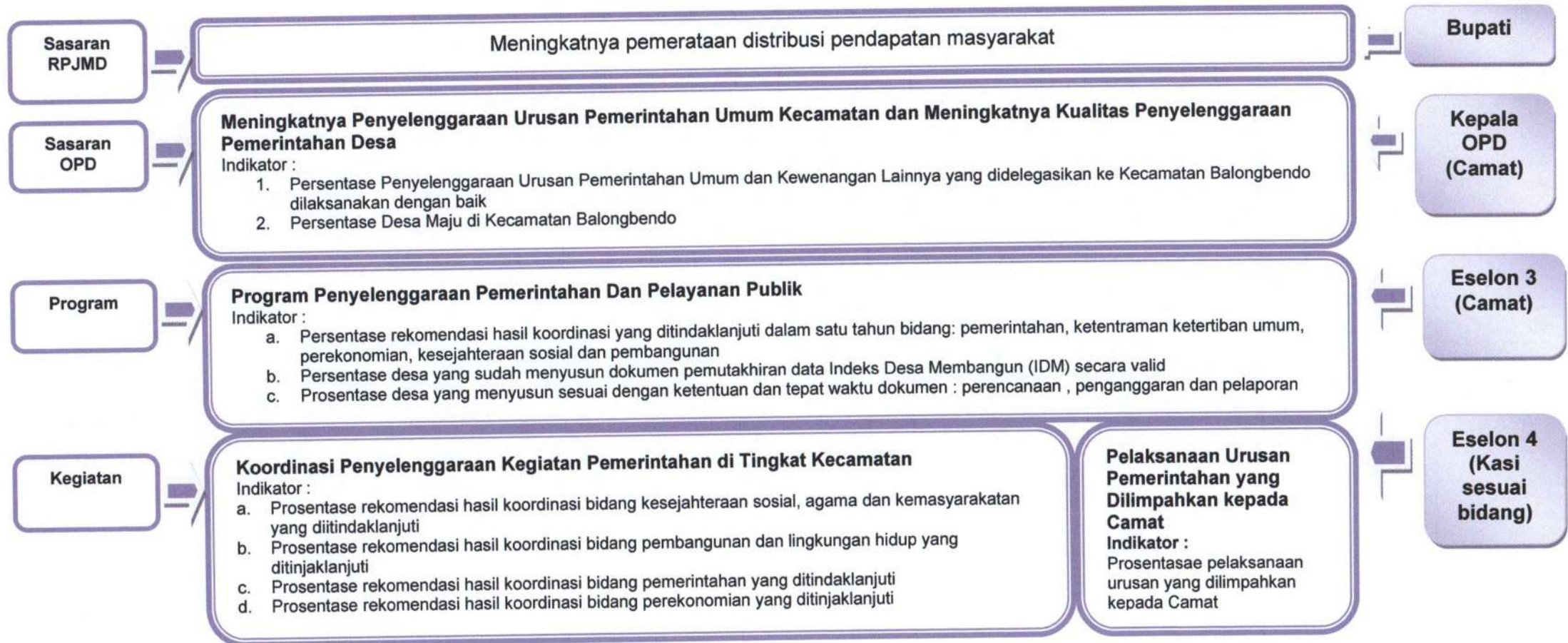
**POHON KINERJA
SASARAN 1 :**

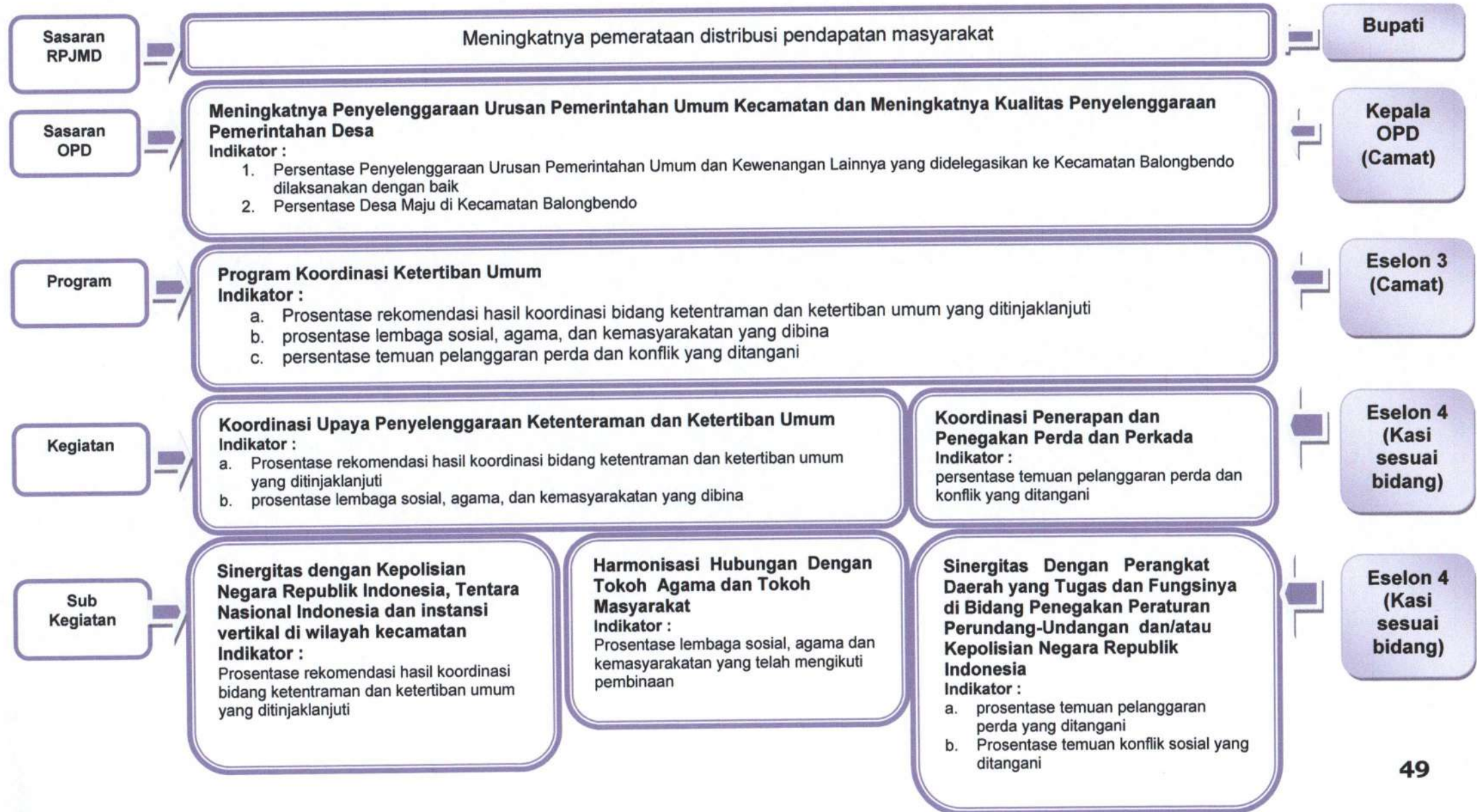
**Gambar 2.2
Pohon Kinerja Sasaran 1**

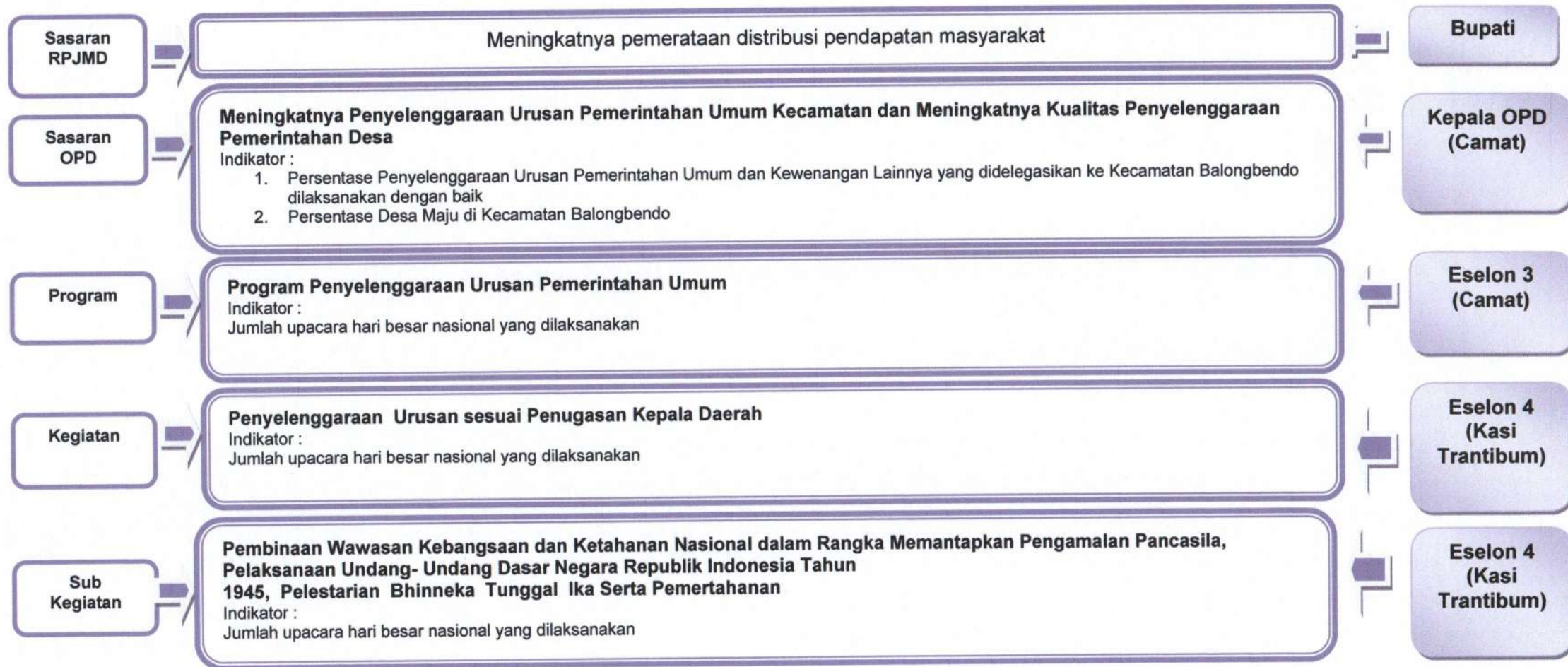


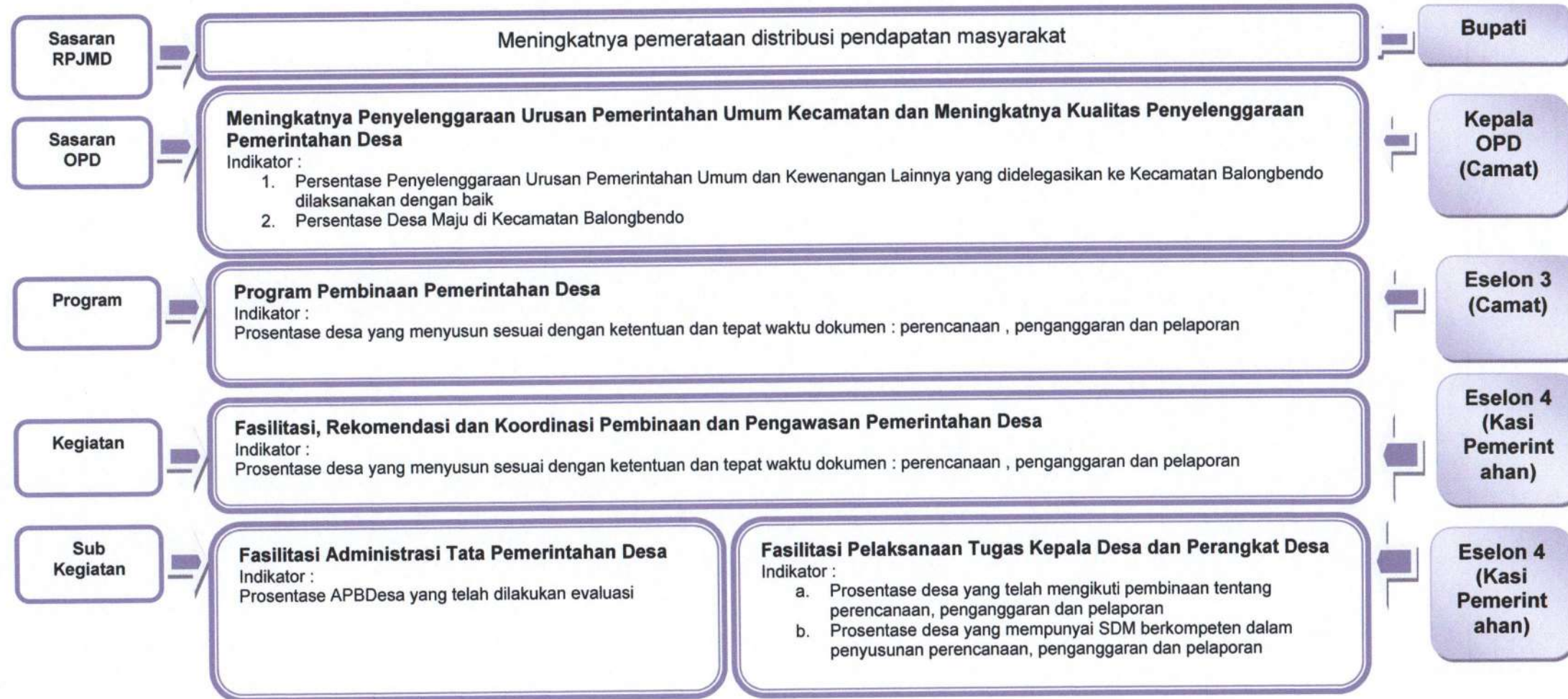
**POHON KINERJA
SASARAN 2 :**

**Gambar 2.2
Pohon Kinerja Sasaran 2**









Tabel 4.1
MATRIKS VISI RPJMD , MISI RPJMD, TUJUAN RPJMD, SASARAN RPJMD, INDIKATOR TUJUAN RPJMD, TUJUAN PD, SASARAN PD dan INDIKATOR SASARAN OPD

No	Visi RPJMD	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan	Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Good Governance Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Survei Kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan
		Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi Indeks GINI	% Desa Maju	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Balongbendo dilaksanakan dengan baik Persentase Desa Maju di Kecamatan Balongbendo

Tabel 4.2
TUJUAN, SASARAN DAN TARGET INDIKATOR SASARAN OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Setiap tahun					
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	80	86	86,50	81	81,50	82
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Balongbendo dilaksanakan dengan baik	NA	NA	80 %	82 %	84 %	86 %
			Persentase Desa Maju di Kecamatan Balongbendo	NA	NA	0 %	5 %	10 %	15 %

Tabel 4.3
Linearitas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Strategi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

NO	Visi: "Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan"					
	Misi RPJMD	Tujuan Renstra OPD	Sasaran Renstra OPD	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif, dan transparan.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Peningkatan manajemen pelayanan melalui penerapan standar pelayanan pemerintahan serta pemanfaatan teknologi informasi.	Menjamin terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan standar pelayanan.
					Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Sebagai Penunjang Pelaksanaan Tupoksi OPD dalam memberikan pelayanan prima	Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan.
					Penguatan kapasitas aparatur dan optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja untuk mewujudkan lembaga yang akuntabel	Meningkatkan potensi kinerja dan disiplin aparatur melalui pembinaan serta pelatihan. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
2.	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintah di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	a. Persentase Penyelenggaraan Urusan Umum Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Balongbendo dilaksanakan dengan baik	Peningkatan sistem pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan serta pembangunan di wilayah kecamatan dan desa.	Meningkatkan kualitas pola koordinasi, melalui pembinaan dan pengawasan terhadap bidang-bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pemerintahan desa.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 RENCANA PROGRAM

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 adalah:

- 1. Program Penyelenggaraan pelayanan umum**
 - a. Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum
 - b. Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum
 - c. Kegiatan Standarisasi Pelayanan
- 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
 - d. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
 - e. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
 - g. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan/ keamanan kantor/pengemudi
 - h. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 - i. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
 - j. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
 - k. Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah & luar negeri
 - l. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - m. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
 - n. Kegiatan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PD
- 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - a. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
 - b. Kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
 - c. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional

- d. Kegiatan pengadaan meubeleur
 - e. Kegiatan pemeliharaan mebeleur
 - f. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
 - g. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
 - h. Kegiatan pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah dinas
 - i. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
- 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
- a. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Kegiatan pendidikan dan pelatihan non-formal
- 6. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
- a. Kegiatan penyusunan laporan keuangan
 - b. Kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporan capaian kinerja PD
- 7. Program Pelayanan Kesekretariatan**
- a. Kegiatan penyediaan barang/jasa perkantoran
 - b. Kegiatan kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
 - c. Kegiatan pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah
 - d. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana aparatur
 - e. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
 - f. Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur
 - g. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur
 - h. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD
 - i. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD
 - j. Kegiatan penyusunan laporan keuangan
- 8. Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan.**
- a. Kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa
 - b. Kegiatan pembinaan perangkat desa

- c. Kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan.
- d. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan
- e. Kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan
- f. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan dan lingkungan
- g. Kegiatan pelayanan pemrosesan permohonan perizinan IMB usaha mikro dan IMB rumah tinggal
- h. Kegiatan pembinaan lembaga, kegiatan lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik
- i. Kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan
- j. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan
- k. Kegiatan pembinaan lembaga dan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan
- l. Kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum
- m. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum
- n. Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan perbup, pengawasan dan penertiban usaha, penanganan konflik sosial
- o. Kegiatan pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban
- p. Kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian
- q. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian
- r. Kegiatan pelayanan pemrosesan permohonan perizinan SIUP, TDP usaha mikro
- s. Kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat dan pedagang kaki lima

9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - c. Kegiatan Administrasi Umum
 - d. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 10. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 11. Program Koordinasi Ketertiban Umum**
- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- 12. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 13. Program Pembinaan Pemerintahan Desa**
- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 5.1

Target Rencana dan Anggaran Program Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR	TARGET DAN PAGU											
			2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			2015	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target
1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	2.014.004.767,00
	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang : Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan lingkungan, dan Perekonomian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	
	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	
	Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan ,	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021

2020

		penganggaran dan pelaporan													
1.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	12.853.823,00
1.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase administrasi kependudukan yang diproses	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	12.853.823,00
		Prosentase pelayanan umum yang telah diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	
		jumlah dokumen SKM yang disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	
		Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60 orang	
1.2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang diitindaklanjuti	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 %	153.573.086,00

		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 %	
		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 %	
		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 %	
1.2.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	153.573.086,00
		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	
		Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021

2020

		<i>ditindaklanjuti</i>													
		<i>Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	
1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada Camat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 %	1.847.577.858,00
1.3.1	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	<i>Prosentase permohonan IMB Usaha Mikro yang telah diberi saran teknis</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	4.482.500,00
		<i>Prosentase permohonan IMB Rumah Tinggal 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang telah diberi saran teknis</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	
1.3.2	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	<i>Prosentase monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah disusun laporannya</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 %	9.690.000,00
		<i>Prosentase monev bidang pembangunan dan lingkungan yang telah disusun laporannya</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	
		<i>Prosentase monev bidang pemerintahan yang telah disusun</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

		<i>laporannya</i>													
		<i>Prosentase monev bidang ketentraman dan ketertiban umum yang telah disusun laporannya</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>100 %</i>	
1.3.3	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>100 %</i>	<i>1.833.405.358,00</i>
		<i>jumlah kader lingkungan hidup</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>60 Orang</i>	
		<i>Prosentase usaha ekonomi masyarakat yang telah mengikuti pembinaan</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>100 %</i>	
		<i>Prosentase pedagang kaki lima yang telah mengikuti pembinaan</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>-</i>	
		<i>Prosentase SIUP usaha mikro yang diterbitkan</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>100 %</i>	
		<i>Prosentase TDP usaha mikro yang diterbitkan</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>100 %</i>	
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	31.783.843,00

		prosentase lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang dibina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	
		persentase temuan pelanggaran perda dan konflik yang ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	
2.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	27.983.843,00
		prosentase lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang dibina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	
2.1.1	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan</i>	<i>Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	10.686.961,00
2.1.2	<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>Prosentase lembaga sosial, agama dan kemasyaralkatan yang telah mengikuti pembinaan</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	17.296.882,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

2.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase temuan pelanggaran perda dan konflik yang ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	3.800.000,00
2.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	prosentase temuan pelanggaran perda yang ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	3.800.000,00
		Prosentase temuan konflik sosial yang ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Kali	41.823.448,00
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Kali	41.823.448,00

3.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan	Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Kali	41.823.448,00
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan , penganggaran dan pelaporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	83.150.000,00
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan ,	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	83.150.000,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | 2020

	Pemerintahan Desa	penganggaran dan pelaporan													
4.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase APBDesa yang telah dilakukan evaluasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	8.850.000,00
4.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	74.300.000,00
		Prosentase desa yang mempunyai SDM berkompeten dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Aparatur SKPD terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80 %	5.310.293.826,00
		Nilai SKM Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	82	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	A	

5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		58.565.620,00
		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Dokumen	56.336.000,00
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	240.000,00
5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	240.000,00
5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	240.000,00
5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	240.000,00
5.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Dokumen	1.269.620,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021

2020

5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	90 %	3.840.574.543,00
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27 Orang	3.835.958.505,00
5.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	214 Buah	663.098,00
5.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	110.000,00
5.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Laporan	3.842.940,00
5.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	82	280.629.863,00
5.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	94 Buah	5.069.886,00
5.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25 Unit	8.209.231,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021

2020

5.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7920 Liter	179.200.000,00
		Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Jenis	3.000.000,00
5.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24 Buah	3.600.000,00
5.3.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	112 Buah	5.445.559,00
5.3.7	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	480 Buah	11.742.960,00
		Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	
5.3.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	64.362.227,00
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	180 Kali	
5.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 Jenis	42.798.600,00
5.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleu yang diadakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Unit	8.197.200,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

5.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7 Unit	34.601.400,00
5.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 %	823.835.200,00
5.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Bulan	147.000.000,00
5.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Orang	676.835.200,00
		Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0 Orang		
		Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar;	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16 Orang		
		Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11 Orang		
5.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 %	255.440.000,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021

2020

5.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Jabatan yang dipelihara;	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Unit	13.000.000,00
		Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0 Buah	
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Unit	
5.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara;	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Unit	15.000.000,00
		Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0 Buah	
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Unit	
5.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60 Unit	20.000.000,00
5.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	58 M2	207.440.000,00
5.7	Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang disiplin	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 %	8.450.000,00
	Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 %	

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

5.7.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48 Buah	4.800.000,00
5.7.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27 Orang	3.650.000,00
1.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100 %	100 %	60.695.000,00	100 %	200.000.000,00	100 %	76.395.000,00	100 %	82.409.500,00	100 %	90.650.450,00	N/A	0,00
1.	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Umum	a. Persentase administrasi kependudukan yang diproses	N/A	N/A	0,00	N/A	200.000.000,00	100 %	36.450.000,00	100 %	40.095.000,00	100 %	44.104.500,00	N/A	0,00
		b. Persentase pelayanan umum yang telah diselesaikan	N/A	N/A		N/A		100 %		100 %		100 %		N/A	
		c. Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses	7 Jenis	7 Jenis		7 Jenis		N/A		N/A		N/A		N/A	
2.	Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Umum	a. Jumlah Peserta Sosialisasi	80 Orang	200 Orang	60.695.000,00	0 Orang	0,00	60 Orang	4.195.000,00	60 Orang	4.614.500,00	60 Orang	5.075.950,00	N/A	0,00
3.	Standarisasi Pelayanan	a. Jumlah Dokumen	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	35.750.000,00	1 Dokumen	37.700.000,00	1 Dokumen	41.470.000,00	N/A	0,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021

2020

2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a.	Tingkat kepuasan Aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	80 %	80 %	730.292.000,00	82 %	606.191.000,00	82 %	548.278.700,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	
	1.	Penyediaan jasa kebersihan kantor/keamanan kantor/pengemudi	a.	Jumlah tenaga kebersihan/keamanan kantor/pengemudi yang bayar	5 Orang	5 Orang	113.267.700,00	5 Orang	118.281.000,00	4 Orang	95.678.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
			b.	Jumlah alat kebersihan/keamanan yang diadakan	235 Buah	246 Buah		246 Buah		254 Buah		N/A		N/A		N/A	
	2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	a.	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus	4 Unit Kendaraan Roda Empat	4 Unit Kendaraan Roda Empat	5.000.000,00	4 Unit Kendaraan Roda Empat	7.000.000,00	4 Unit Kendaraan Roda Empat	6.000.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	3.	Penyediaan alat tulis kantor	a.	Jenis alat tulis kantor yang disediakan	20 Jenis	39 Jenis	29.800.000,00	34 Jenis	10.487.000,00	51 Jenis	10.875.500,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	a.	Jenis barang cetakan dan penggandaan	20 Jenis	26 Jenis	15.385.000,00	2000 Lembar	6.000.000,00	4 Jenis	8.742.200,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	5.	Penyediaan makanan dan minuman	a.	Jumlah mamin yang disediakan	1320 Kotak	2.266 Kotak	69.990.000,00	3.300 Kotak	69.850.000,00	480 Kotak	9.650.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

6.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	a.	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	80.000.000,00	12 Bulan	51.335.000,00	12 Bulan	40.000.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
7.	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PD	a.	Jumlah survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	35.750.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
8.	Penyediaan jasa surat menyurat	a.	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	2000 Surat	2000 Surat	2.000.000,00	2000 Surat	2.000.000,00	2000 Surat	2.000.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
9.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	a.	Biaya rekening air, listrik dan telpon yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	126.600.000,00	12 Bulan	110.000.000,00	12 Bulan	118.800.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
10.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	a.	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan dan barang	12 Orang	15 Orang	113.267.700,00	12 Orang	118.281.000,00	13 Orang	95.678.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
11.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	a.	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	3.600.000,00	12 Bulan	3.900.000,00	12 Bulan	3.600.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
12.	Penyediaan peralatan rumah tangga	a.	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	5 Jenis	15.000.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 **2020**

	13.	Penyediaan bahan logistik kantor	a.	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	9840 Liter	14.940 Liter	155.400.000,00	10.788 Liter	97.092.000,00	9.960 Liter	89.640.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	14.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	a.	Jumlah komponen listrik/ bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	322 Buah	15.981.600,00	7 Jenis	12.105.000,00	5 Jenis	2.815.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
3.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	a.	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	80 %	85 %	1.055.665.000,00	85 %	412.308.000,00	85%	1.543.000.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	
	1.	Pembangunan gedung kantor	a.	Jumlah gedung kantor yang dibangun	N/A	1 Unit	224.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	2.	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	a.	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	1 Unit	7 Unit	309.350.000,00	3 Unit	200.000.000,00	4 Unit	90.000.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	3.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan operasional	a.	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	45.000.000,00	4 Unit	30.000.000,00	4 Unit	20.000.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	4.	Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur	a.	Jumlah Meubeler yang dipelihara	N/A	150 Unit	10.000.000,00	10 Unit	7.308.000,00	0 Unit	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	5.	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	a.	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	42 Unit	100 Unit	30.815.000,00	30 Unit	20.000.000,00	30 Unit	63.000.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 **2020**

6.	Pengadaan meubeleur	a.	Jenis dan jumlah meubeleur yang diadakan	2 Unit	2 Unit	72.750.000,00	0 Unit	0,00	2 Unit	7.500.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
7.	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	a.	Jumlah gedung yang direhab sedang/ berat	1 Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	155.000.000,00	1 Unit	1.250.000.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
8.	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	a.	Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	24 Unit	37 Unit	363.750.000,00	0 Unit	0,00	23 Unit	112.500.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	a.	Persentase aparatur yang disiplin	80 %	80 %	8.000.000,00	80 %	0,00	80 %	9.570.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	a.	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	N/A	0 stel	0,00	0 stel	0,00	29 stel	9.570.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
2.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	a.	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu yang disediakan	N/A	32 stel	8.000.000,00	0 stel	0,00	0 stel	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	a.	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu	80 %	100 %	47.300.000,00	100 %	0,00	100 %	1.260.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 **2020**

1.	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja OPD	a.	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	44.000.000,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	725.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	
		b.	Jumlah laporan capaian kinerja PD yang disusun	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		N/A		N/A		N/A		
		c.	Jumlah sistem informasi PD yang dikelola	N/A	0 sistem		0 sistem		0 sistem		N/A		N/A		N/A		
2.	Penyusunan laporan keuangan	a.	Jumlah laporan keuangan yang disusun	0 Buah	1 buah	3.300.000,00	1 buah	0,00	1 buah	535.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	
6.	Program Pelayanan Kesekretariatan	a.	Tingkat kepuasan aparatur PD terhadap pelayanan kesekretariatan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	83 %	1.809.700.070,00	83 %	1.979.096.810,00	N/A	0,00	
1.	Penyediaan barang/jasa perkantoran	a.	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	2000 Buah	585.700.070,00	2000 Buah	630.596.810,00	N/A		
		b.	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	N/A	N/A		N/A		N/A		14 Orang/ Bulan		14 Orang/ Bulan		N/A		
		c.	Jumlah BBM yang disediakan	N/A	N/A		N/A		N/A		9960 Liter		9960 Liter		N/A		
		d.	Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	N/A	N/A		N/A		N/A		5 Unit		5 Unit		N/A		
		e.	Jumlah jamuan rapat/ tamu yang disediakan	N/A	N/A		N/A		N/A		480 Kotak		480 Kotak		N/A		

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

		f.	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	N/A	N/A		N/A		N/A	12 Bulan		12 Bulan		N/A		
		g.	Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar	N/A	N/A		N/A		N/A	N/A		N/A		N/A		
		h.	Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	N/A	N/A		N/A		N/A	48 Buah		48 Buah		N/A		
		i.	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan yang tersedia	N/A	N/A		N/A		N/A	76 Buah		76 Buah		N/A		
		j.	Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	N/A	N/A		N/A		N/A	6 Orang		6 Orang		N/A		
		k.	Jumlah jam lembur yang terbayar	N/A	N/A		N/A		N/A	N/A		N/A		N/A		
2.	Kegiatan Kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	a.	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	100 %	80.000.000,00	100 %	90.000.000,00	N/A	0,00
3.	Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	a.	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	4 Laporan	10.000.000,00	4 Laporan	11.000.000,00	N/A	0,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

4.	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	a.	Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/dinas yang dibangun	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Unit	675.000.000,00	1 Unit	750.000.000,00	N/A	0,00	
		b.	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	N/A	N/A		N/A		N/A		30 Unit			30 Unit		N/A	
		c.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	N/A	N/A		N/A		N/A		1 Unit			1 Unit		N/A	
		d.	Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/ jabatan yang direhab sedang/ berat	N/A	N/A		N/A		N/A		250 M2			250 M2		N/A	
5.	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	a.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	5 Unit	197.000.000,00	5 Unit	225.000.000,00	N/A	0,00	
		b.	Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	N/A	N/A		N/A		N/A		300 M2			300 M2		N/A	
		c.	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	N/A	N/A		N/A		N/A		50 Unit			50 Unit		N/A	

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

6.	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	a.	Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	29 Buah	17.000.000,00	29 Buah	17.000.000,00	N/A	0,00
		b.	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	N/A	N/A		N/A		N/A		29 Buah		29 Buah		N/A	
7.	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	a.	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	2 Dok	70.000.000,00	2 Dok	80.000.000,00	N/A	0,00
		b.	Jumlah data dan informasi yang disusun	N/A	N/A		N/A		N/A		1 Dok		1 Dok		N/A	
		c.	Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)	N/A	N/A		N/A		N/A		4 Dok		4 Dok		N/A	
8.	Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	a.	Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dok	50.000.000,00	1 Dok	50.000.000,00	N/A	0,00
		b.	Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun	N/A	N/A		N/A		N/A		2 Laporan		2 Laporan		N/A	
		c.	Jumlah Dokumen SKM yang disusun	N/A	N/A		N/A		N/A		1 Dok		1 Dok		N/A	
9.	Penyusunan laporan keuangan	a.	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	NA	0,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	5.500.000,00	N/A	0,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

7.	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	100 %	323.363.500,00	100 %	359.474.850,00	100 %	399.952.340,00	N/A	0,00
		b.	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) secara valid	N/A	N/A		N/A		100 %		100 %		100 %		N/A	
		c.	Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan , penganggaran dan pelaporan	N/A	N/A		N/A		90 %		90 %		90 %		N/A	

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

1.	Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pemerintahan	a.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	90 %	5.490.000,00	95 %	6.039.000,00	95 %	6.642.900,00	N/A	0,00
2.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	a.	Persentase APBDes yang telah dilakukan evaluasi	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	100 %	11.691.000,00	100 %	12.860.100,00	100 %	14.146.110,00	N/A	0,00
3.	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan	a.	Persentase monev bidang pemerintahan yang telah disusun laporannya	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	90 %	6.286.000,00	90 %	6.914.600,00	90 %	7.606.060,00	N/A	0,00
4.	Pembinaan Perangkat Desa	a.	Persentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	100 %	11.916.000,00	100 %	13.107.600,00	100 %	14.418.360,00	N/A	0,00
		b.	Persentase desa yang telah mempunyai SDM yang berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan,	N/A	N/A		N/A		100 %		100 %		100 %		N/A	

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

			penganggaran dan pelaporan													
5.	Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	a.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	100 %	6.401.000,00	100 %	7.041.100,00	100 %	7.745.210,00	N/A	0,00
6.	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Perbup, Pengawasan dan Penertiban Usaha, Penanganan Konflik Sosial	a.	Persentase temuan konflik yang ditangani	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	80 %	128.416.000,00	85 %	141.257.600,00	85 %	155.383.360,00	N/A	0,00
		b.	Persentase temuan pelanggaran perda yang ditangani	N/A	N/A		N/A		80 %		85 %		85 %		N/A	
7.	Pelaksanaan Upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	a.	Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Kali	37.750.000,00	1 Kali	45.300.000,00	1 Kali	54.360.000,00	N/A	0,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

8.	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	a.	Persentase monev bidang ketentraman dan ketertiban umum yang telah disusun laporannya	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	85 %	2.516.000,00	90 %	2.767.600,00	90 %	3.044.360,00	N/A	0,00
9.	Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Perekonomian	a.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	100 %	7.630.000,00	100 %	8.393.000,00	100 %	9.232.300,00	N/A	0,00
10.	Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima	a.	Persentase usaha ekonomi masyarakat yang telah mengikuti pembinaan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	70 %	5.635.000,00	75 %	6.198.500,00	80 %	6.818.350,00	N/A	0,00
		b.	Persentase pedagang kaki lima yang telah mengikuti pembinaan	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
11.	Pelayanan pemrosesan permohonan perizinan SIUP, TDP Usaha Mikro	a.	Persentase SIUP usaha mikro yang diterbitkan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	60 %	5.450.000,00	70 %	5.995.000,00	75 %	6.594.500,00	N/A	0,00
		b.	Persentase TDP usaha mikro yang diterbitkan	N/A	N/A		N/A		60 %		70 %		75 %			

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

12.	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian	a.	Persentase monev bidang perekonomian yang telah disusun laporannya	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	85 %	2.016.000,00	90 %	2.217.600,00	90 %	2.439.360,00	N/A	0,00
13.	Koordinasi dan Kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam Kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	a.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	85 %	27.743.000,00	85 %	30.517.300,00	90 %	33.569.030,00	N/A	0,00
14.	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	a.	Persentase monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah disusun laporannya	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	90 %	2.641.000,00	90 %	2.905.100,00	90 %	3.195.610,00	N/A	0,00
15.	Pembinaan Lembaga dan Kegiatan Sosial, Agama dan Kemasyarakatan	a.	Persentase lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah mengikuti pembinaan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	80 %	26.695.500,00	85 %	29.365.050,00	85 %	32.301.560,00	N/A	0,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 **2020**

16.	Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam Kegiatan Bidang Pembangunan dan Lingkungan	a.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	90 %	14.568.000,00	90 %	16.024.800,00	90 %	17.627.280,00	N/A	0,00
		b.	Persentase desa yang telah melakukan Musrenbang	N/A	N/A		N/A		100 %		100 %	100 %		N/A		
17.	Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan IMB Usaha Mikro dan IMB Rumah Tinggal	a.	Persentase permohonan IMB Rumah Tinggal 1 Lantai Luasan Maksimal Bangunan 400m2 yang telah diberi saran teknis	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	100 %	5.451.000,00	100 %	5.996.100,00	100 %	6.595.710,00	N/A	0,00
		b.	Persentase permohonan IMB Usaha Mikro yang telah diberi saran teknis	N/A	N/A		N/A		N/A		N/A	N/A		N/A		
18.	Pembinaan Lembaga, Kegiatan Lingkungan Hidup dan Penanganan Sampah Domestik	a.	Persentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	100 %	6.817.000,00	100 %	7.498.700,00	100 %	8.248.570,00	N/A	0,00
		b.	Jumlah kader lingkungan hidup	N/A	N/A		N/A		60 Orang		60 Orang	60 Orang		N/A		

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021

2020

19.	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pembangunan dan Lingkungan	a.	Persentase monev bidang pembangunan dan lingkungan yang telah disusun laporannya	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	90 %	8.251.000,00	90 %	9.076.100,00	90 %	9.983.710,00	N/A	0,00
8.	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum	a.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum						N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pemerintahan	a.	Jumlah aset desa yang terinventaris						N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
		b.	Jumlah rakor seksi pemerintahan						N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan	a.	Jumlah perangkat desa yang dilatih/dibina						N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
		b.	Jumlah lembaga desa yang dilantik						N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
		c.	Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan lomba-lomba Seksi Pemerintahan						N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	a.	Jumlah Perdes yang dievaluasi						N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
		b.	Jumlah desa/kelurahan yang disupervisi administrasinya						N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban	a.	Jumlah Rakor Seksi Ketentraman dan Ketertiban						N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban	a.	Jumlah penanganan bencana						N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
		b.	Jumlah anggota linmas/ masyarakat yang dibina dan dilatih						N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
		c.	Jumlah operasi tribum						N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	a.	Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan						N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
		b.	Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan lomba						N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi perekonomian	a.	Jumlah peserta pembinaan wirausaha baru						N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

		b.	Jumlah fasilitasi promosi produk industri dan produk unggulan					N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
		c.	Jumlah desa yang dibina dalam penyusunan Profil Desa/PKL dan UMKMK					N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial	a.	Jumlah rakor seksi kesejahteraan sosial					N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial	a.	Jumlah pembinaan dan fasilitasi rumah tangga miskin					N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
		b.	Jumlah pembinaan dan fasilitasi kegiatan keragaman budaya dan pawai budaya yang diikuti					N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	Pelaksanaan pawai budaya dan lomba seksi kesejahteraan sosial	a.	Jumlah pembinaan dan fasilitas kegiatan keragaman budaya dan pawai budaya yang diikuti					N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

		b.	Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan lomba Seksi Kesejahteraan Sosial.					N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan seksi pembangunan fisik	a.	Jumlah peserta musrenbang kecamatan					N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
		b.	Jumlah musrenbangdes yang dimonitor					N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
		c.	Jumlah rakor seksi pembangunan fisik					N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	Pengelolaan lingkungan hidup	a.	Jumlah penanaman pohon lindung di Ruang Milik Jalan Desa					N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
		b.	Jumlah pembinaan dan pengelolaan sampah sampai ke TPS/TPST dan Ruang Terbuka Hijau					N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
	Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pembangunan fisik		Jumlah obyek/ pemohon IMB yang disurvei					N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
			Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan lomba seksi pembangunan fisik					N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00

Reviu Renstra Kecamatan Balongbendo 2016 - 2021 | **2020**

			Jumlah fasilitas dan inventarisasi data aset milik Pemerintah Daerah						N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BALONGBENDO MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan. Renstra Kecamatan Balongbendo ini akan mendukung RPJMD Kabupaten Sidoarjo Misi 1 Tujuan 1 Sasaran 2 yaitu ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi*** serta Misi 2 Tujuan 2 Sasaran 4 yaitu ***Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan Masyarakat***.

Sasaran-sasaran di atas, akan dikerjakan oleh Kecamatan Balongbendo sesuai dengan tugas pokok, dan fungsinya dengan merumuskan beberapa tujuan, yang manatujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk dapat memecahkan masalah dan menangani isu strategis sehingga sekaligus dapat melaksanakan dan mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Selanjutnya, tujuan Renstra OPD yang dimaksud yaitu :

1. ***Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan***
2. ***Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kecamatan***

6.2 INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BALONGBENDO, KABUPATEN KABUPATEN SIDOARJO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan.

Adapun kegunaan dari indikator kinerja lebih kepada dasar penilaian kinerja dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Indikator kinerja Kecamatan Balongbendo yang mengacu pada RPJMD tertuang dalam berikut:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Kecamatan Balongbendo 2016-2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target setiap tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	78	80	86	86,50	81	81,50	82	82
2.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang :								
	a. Pemerintahan	NA	80 %	85 %	-	-	-	-	-
	b. Ketentraman dan Ketertiban Umum	NA	80 %	85 %	-	-	-	-	-
	c. Perekonomian	NA	80 %	82 %	-	-	-	-	-
	d. Kesejahteraan Sosial	NA	80 %	85 %	-	-	-	-	-
	e. Pembangunan	NA	80 %	85 %	-	-	-	-	-
3.	Persentase desa dengan tata kelola administrasi pemerintahan kategori baik	NA	NA	NA	-	-	-	-	-
4.	Peningkatan rata – rata nilai IDM Desa se Kecamatan Balongbendo	NA	NA	NA	-	-	-	-	-
5.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Balongbendo dilaksanakan dengan baik	NA	NA	NA	80 %	82 %	84 %	86 %	86 %
6.	Persentase Desa Maju di Kecamatan Balongbendo	NA	NA	NA	0 %	5 %	10 %	15 %	15 %

BAB VI PENUTUP

Renstra Kecamatan Balongbendo Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Balongbendo ini didasarkan pada potensi yang ingin dikembangkan yang berkaitan dengan pelayanan, sarana dan prasarana transportasi yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo (RPJMD) tahun 2016-2021.

Penyusunan renstra ini melalui proses analisis dengan menggunakan strategis analisis SWOT dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Dengan disusunnya renstra ini diharapkan berguna sebagai pedoman dan landasan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun rencana kegiatan tahunan dan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan tahun dan lima tahunan.

Implementasi Renstra Kecamatan Balongbendo tahun 2016 -2021 pada tahapan Renja selama kurun waktu 5 (lima) tahun, masih dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan mengikuti terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan di lapang dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan.